



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : POLITEKNIK NEGERI MALANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS SUHARDONO
2. Jabatan : KPS D3 KONSTRUKSI JALAN, JEMBATAN DAN BANGUNAN AIR
3. NHK : 804315

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.167.400.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/58 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.005.900.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/30 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 161.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 12.800.000

1. MOTOR, HONDA C100 Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 1FD/SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.700.000
3. MOTOR, YAMAHA B3BA/T - SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 5.100.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 51.730.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 87.977.378

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.319.907.378

III. HUTANG Rp. 10.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.309.907.378

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.